



## MANAJEMEN SEKOLAH TERPENCIL

Asri Rahayu Hulopi<sup>1\*</sup>, Arifin Sukung<sup>2</sup>, Zulystiawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> FIP Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.

Info Artikel	Abstrak
<p><b>Riwayat Artikel:</b></p> <p>Diterima: 15 Januari 2025</p> <p>Direvisi: 20 Februari 2025</p> <p>Disetujui: 5 Maret 2025</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Manajemen Sekolah, Sekolah Terpencil, SMPN 1 Pinogu, Provinsi Gorontalo.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses manajemen pendidikan pada sekolah yang berada di wilayah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau khususnya di daerah pedalaman Provinsi Gorontalo, yang di tinjau dari: (1) pengelolaan tenaga pendidik, (2) pembelajaran, serta (3) sarana dan prasarana di SMPN 1 Pinogu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data interaktif, didukung dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan tenaga pendidik dilakukan melalui rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik lokal dengan kriteria sarjana, serta pelatihan melalui MGMP; (2) Pengelolaan pembelajaran mencakup perancangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran dengan perangkat RPP, silabus, dan KKM, meskipun penggunaan teknologi terbatas akibat keterbatasan akses internet dan listrik; dan (3) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan infrastruktur melalui kolaborasi dengan pemerintah dan komite sekolah, pemeliharaan bangunan, serta pengelolaan peralatan teknologi seperti laptop dan proyektor yang digunakan bergantian oleh guru.</p>
<p><b>Korespondensi:</b></p> <p>Asri Rahayu Hulopi* FIP Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.</p> <p>E-mail: asri.hulopi21@gmail.com</p>	<p><b>Abstract</b></p> <p>This study aims to describe the educational management process in schools located in remote or hard-to-reach areas, particularly in the remote area of Gorontalo Province, as viewed from: (1) teacher management, (2) learning, and (3) facilities and infrastructure at SMPN 1 Pinogu. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. Data analysis employs interactive data analysis, supported by data validity checks using triangulation techniques. The research findings indicate that: (1) teacher management is conducted through the recruitment and placement of local teachers with a bachelor's degree qualification, as well as training through the MGMP; (2) Learning management includes curriculum design and learning activities using lesson plans, syllabi, and competency-based learning outcomes, although the use of technology is limited due to limited internet access and electricity; and (3) Facilities and infrastructure management includes infrastructure planning through collaboration with the government and school committee, building maintenance, and management of technological equipment such as laptops and projectors that are shared among teachers.</p>



## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, dengan tujuan menghasilkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Melalui pendidikan, individu belajar mengekspresikan diri secara lebih konsisten dan produktif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam konteks sekolah, guru dan kepala sekolah merupakan komponen kunci dalam menjamin kualitas pendidikan. Efektivitas lembaga pendidikan sangat bergantung pada optimalisasi peran semua unsur sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Kepala sekolah secara khusus memegang peran strategis dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif dan memfasilitasi kolaborasi antar guru guna meningkatkan mutu proses pembelajaran. Leithwood & Jantzi (2005) mengungkapkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang berfokus pada peningkatan kapasitas guru dan pencapaian tujuan pembelajaran memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sekolah. Kepemimpinan yang kuat juga mendorong terbentuknya komunitas belajar profesional di antara tenaga pendidik, yang memungkinkan pertukaran pengalaman, ide, serta praktik-praktik terbaik. Hal ini sejalan dengan temuan Robinson et al. (2008) yang menyatakan bahwa kepemimpinan efektif di sekolah berkontribusi langsung pada peningkatan hasil belajar siswa dengan mendorong guru bekerja sama dalam komunitas profesional yang fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu, Vangrieken et al. (2017) menegaskan bahwa komunitas belajar guru yang didukung oleh kepemimpinan sekolah yang efektif akan meningkatkan pertukaran ide dan praktik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran juga sangat penting, dan kepala sekolah harus memfasilitasi kolaborasi serta pemberdayaan guru agar pembelajaran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Harris & Muijs, 2005).

Idealisme pengelolaan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas menghadapi tantangan nyata ketika dihadapkan pada kondisi riil yang ada di wilayah tertinggal. Penyelenggaraan pendidikan di wilayah tertinggal (terpencil) menghadirkan tantangan yang sangat kompleks dan multidimensional. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 mendefinisikan daerah tertinggal sebagai wilayah kabupaten yang memiliki tingkat pembangunan dan perkembangan sosial ekonomi yang jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain secara nasional. Ciri khas wilayah ini meliputi tingginya angka kemiskinan, terbatasnya aktivitas ekonomi produktif, infrastruktur yang minim dan kurang memadai, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), serta ketergantungan yang tinggi terhadap eksploitasi sumber daya alam yang seringkali tidak berkelanjutan (Falah & Hadna, 2022). Kondisi ini menyebabkan akses dan mutu pendidikan di wilayah terpencil seringkali jauh dari standar nasional, sehingga memerlukan perhatian dan strategi khusus dalam pengelolaannya (Shafira et al., 2025). Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya soal penyampaian materi ajar, tetapi juga soal bagaimana mengoptimalkan seluruh komponen sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang adaptif terhadap kondisi lokal. Efektivitas lembaga pendidikan di daerah terpencil sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan sumber daya secara holistik dan inovatif kepala sekolah memegang peran sentral dalam hal ini, tidak hanya sebagai manajer administratif tetapi juga sebagai pemimpin pedagogis yang mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif dan memberdayakan seluruh tenaga pendidik untuk berkolaborasi secara aktif.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Raihani (2007), menegaskan pentingnya sensitivitas terhadap konteks lokal dalam pengelolaan sekolah di wilayah terpencil. Keberhasilan pengelolaan pendidikan di daerah terpencil sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, fleksibilitas kurikulum, dan pendekatan berbasis komunitas yang mendukung keberlanjutan pendidikan. Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 menetapkan standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang wajib diimplementasikan oleh seluruh satuan pendidikan, termasuk yang berada di wilayah terpencil. Namun, penerapan kebijakan tersebut sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta aksesibilitas yang terbatas. Kondisi ini menuntut pengelolaan

yang adaptif dan inovatif, terutama dalam pengelolaan tenaga pendidik, proses pembelajaran, dan sarana prasarana pendidikan.

Kecamatan Pinogu di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu wilayah terpencil yang menghadapi berbagai kendala dalam penyelenggaraan pendidikan. Hambatan utama yang dialami sekolah-sekolah di wilayah tersebut, termasuk SMPN 1 Pinogu, meliputi tantangan geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur, kurangnya guru berkualitas, serta minimnya akses terhadap teknologi dan informasi. Dalam kondisi tersebut, manajemen sekolah memegang peran penting untuk memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan observasi awal, pengelola SMPN 1 Pinogu menunjukkan komitmen tinggi meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Perencanaan sekolah dirancang secara kolaboratif oleh kepala sekolah, guru, dan staf administrasi, walaupun pelaksanaannya sering terkendala oleh minimnya sumber daya finansial dan sarana fisik yang tersedia. Sebagai lembaga pendidikan formal di daerah terpencil, SMPN 1 Pinogu menjadi representasi nyata kondisi yang dialami sekolah-sekolah serupa dan menjadi objek penelitian yang relevan untuk memahami secara nyata strategi pengelolaan sekolah dalam menghadapi keterbatasan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses manajemen pendidikan di sekolah terpencil dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu: (1) pengelolaan tenaga pendidik, (2) pengelolaan proses pembelajaran, dan (3) pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, di SMPN 1 Pinogu.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus (Yin, 2018) yang dilaksanakan di SMPN 1 Pinogu, beralamat di Jalan Inpres, Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Sekolah ini terletak di wilayah yang sangat terpencil, tepatnya di kawasan Suwawa paling ujung, dengan jarak sekitar 70 kilometer dari pusat kota. Akses menuju lokasi sangat terbatas dan sulit dilalui karena medan jalan yang menanjak, menurun, dan berlumpur, sehingga hanya dapat ditempuh menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Pemilihan sumber data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman mendalam terhadap objek penelitian (Arikunto, 2002). Sumber data primer terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, orang tua siswa, serta siswa. Data sekunder diperoleh melalui observasi lapangan, kajian pustaka berupa buku dan jurnal ilmiah, serta dokumentasi yang relevan (Budiastuti & Bandur, 2018). Untuk memperkaya data, dilakukan juga wawancara mendalam dengan informan kunci.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dengan menggunakan pendekatan pengamatan non-partisipan. Keterlibatan langsung di lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, sekaligus meningkatkan validitas hasil penelitian (Sugiyono, 2019). Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber guna memastikan kredibilitas dan keandalan temuan penelitian (Arikunto, 2002).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengkaji manajemen sekolah di wilayah terpencil dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) Pengelolaan Tenaga Pendidik, (2) Pengelolaan Pembelajaran, dan (3) Pengelolaan Sarana dan Prasarana di SMPN 1 Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

### **Pengelolaan Tenaga Pendidik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tenaga pendidik di SMPN 1 Pinogu, dilakukan melalui beberapa tahap sistematis. Pertama, analisis kebutuhan tenaga pendidik dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh guru untuk mengevaluasi mata pelajaran yang masih kurang optimal. Evaluasi ini didukung oleh pengumpulan data dasar seperti jumlah siswa, jumlah guru yang tersedia, dan mata pelajaran yang diajarkan. Kedua, proses seleksi calon guru dimulai dengan pengisian formulir pendaftaran yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan, sebagai bagian dari prosedur administratif rekrutmen. Ketiga, kriteria penerimaan guru honorer menuntut kualifikasi minimal sarjana (S1), pendaftaran di DAPODIK, serta kepemilikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Keempat, pelatihan dan dukungan tambahan seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang didanai dana BOS serta layanan transportasi memungkinkan guru mengikuti pelatihan di luar wilayah terpencil, sehingga meningkatkan kompetensi dan kemampuan mengajar mereka. Kelima, aspek kesejahteraan dan motivasi guru diakomodasi melalui kegiatan sosial yang mendukung kesehatan mental dan program pelatihan berkala yang secara signifikan memperkuat semangat kerja guru, meskipun kondisi medan dan akses transportasi masih menjadi kendala signifikan.

Temuan penelitian tentang proses pengelolaan tenaga pendidik ini sejalan dengan Nasir et al. (2020), yang menyatakan bahwa proses pengelolaan tenaga pendidik diawali dengan seleksi administrasi yang ketat dan berlanjut dengan berbagai upaya motivasi untuk meningkatkan semangat kerja guru, seperti penghargaan dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah (Ucok et al., 2017). Selain itu, perencanaan tenaga pendidik yang dilakukan kepala sekolah berfokus pada identifikasi tugas dan kebutuhan urgensi untuk menghindari kesalahan dalam rekrutmen dan penempatan guru, serta pembagian tugas yang disesuaikan dengan jumlah tenaga pendidik yang terbatas (Nurussalami, 2022). Masjudin & Husniati (2018) juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia pendidikan harus mencakup perencanaan, rekrutmen, pelatihan, hingga evaluasi kinerja secara berkelanjutan untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal. Dengan demikian, meskipun beroperasi di wilayah terpencil dengan berbagai keterbatasan, pengelolaan tenaga pendidik di SMPN 1 Pinogu dilakukan secara adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

### **Pengelolaan Pembelajaran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembelajaran di SMPN 1 Pinogu dilakukan melalui beberapa mekanisme yang menyesuaikan dengan kondisi geografis dan ketersediaan sumber daya. Pertama, perancangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran melibatkan komunitas Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang berperan aktif dalam merancang RPP, modul ajar, serta menyusun komponen inti pembelajaran seperti tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Kedua, penggunaan teknologi dalam pembelajaran masih sangat terbatas disebabkan infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil dan ketersediaan listrik yang terbatas di beberapa ruang kelas. Ketiga, pengelolaan kelas menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Guru menerapkan pendekatan yang fleksibel dan berpusat pada siswa, misalnya memberikan tugas mandiri atau mendorong diskusi kelompok saat guru tidak dapat hadir.

Temuan penelitian tentang proses pengelolaan pembelajaran ini sejalan dengan pendapat Tamam et al. (2020), yang menyatakan bahwa pengelolaan pembelajaran mencakup perencanaan tujuan pengajaran yang jelas, pengorganisasian strategi belajar, bimbingan serta motivasi siswa, evaluasi hasil belajar, dan penerapan disiplin kelas. Pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memperbaiki kelemahan dan memotivasi guru, serta pengembangan faktor pendukung guna mengatasi hambatan dalam proses belajar. Pengelolaan pembelajaran meliputi serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan yang melibatkan seluruh elemen sekolah. Perencanaan dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik, penyediaan media pembelajaran, dan penetapan tujuan. Pengorganisasian mencakup pengaturan

ruang kelas dan strategi belajar, sementara penggerakkan berupa pemberian tugas dan pengarahan belajar. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi rutin untuk memastikan pencapaian hasil belajar (Warsono, 2020). Dengan demikian, pengelolaan pembelajaran di wilayah terpencil menuntut pendekatan adaptif berbasis kebutuhan lokal. Meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas, sekolah berupaya memanfaatkan metode kreatif seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok untuk mempertahankan motivasi belajar siswa. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dioptimalkan meski dengan kendala jaringan. Penilaian dilakukan secara fleksibel melalui tugas proyek, ujian lisan, dan portofolio, sehingga siswa dapat menunjukkan kompetensi secara variatif. Guru juga memberikan pendampingan ekstra bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, termasuk dengan mendatangi rumah siswa bila diperlukan.

### **Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di SMPN 1 Pinogu dilaksanakan dengan mengutamakan kolaborasi antara komite sekolah, orang tua siswa, dan guru. Perencanaan pembangunan infrastruktur seperti gerbang sekolah dilakukan dengan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat melalui komite sekolah. Sebagian anggaran dana BOS dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan fasilitas, didukung pula oleh donasi orang tua siswa. Pemeliharaan rutin infrastruktur ini penting untuk menjaga kondisi bangunan sekolah agar tetap fungsional. Selain itu, pengelolaan sumber daya teknologi, seperti laptop, Chromebook, dan proyektor, dilakukan secara bergantian dengan pengaturan yang ketat mengingat keterbatasan jumlah perangkat dan konektivitas internet yang terbatas.

Temuan penelitian tentang proses pengelolaan sarana dan prasarana ini mendukung konsep pengelolaan sarana dan prasarana yang diuraikan oleh Dewi & Noor (2024), yang meliputi proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan barang secara sistematis. Pengelolaan yang baik penting agar sarana dan prasarana dapat mendukung proses belajar mengajar secara efektif (Bararah, 2020). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi sarana dan prasarana di wilayah terpencil masih sangat kurang memadai, sehingga berdampak pada kualitas pembelajaran. Manajemen yang kurang optimal terutama pada aspek perencanaan dan pengadaan dapat menghambat efektivitas proses belajar mengajar (Yesa, 2022). Meskipun demikian, pengelolaan sarana dan prasarana di SMPN 1 Pinogu mengedepankan prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Sekolah memaksimalkan fasilitas yang ada, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas olahraga agar tetap berfungsi dengan baik. Inovasi dilakukan dengan memanfaatkan ruang belajar terbuka dan sumber daya alam sekitar sebagai media pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat, termasuk orang tua dan tokoh masyarakat, dalam merawat fasilitas sekolah turut meningkatkan keberlanjutan sarana dan prasarana. Partisipasi ini juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan di sekolah tersebut.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengelolaan pendidikan di SMPN 1 Pinogu sebagai sekolah di wilayah terpencil memerlukan pendekatan manajerial yang adaptif dan kolaboratif, terutama dalam pengelolaan tenaga pendidik, proses pembelajaran, dan sarana prasarana, guna mengatasi keterbatasan geografis dan sumber daya. Kepala sekolah dan guru secara aktif melakukan perencanaan dan pelaksanaan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran meskipun dihadapkan pada kendala infrastruktur dan akses teknologi yang minim, serta tantangan motivasi dan kesejahteraan tenaga pendidik. Temuan ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang strategis serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di daerah terpencil, sekaligus menekankan perlunya inovasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal sebagai media pembelajaran. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model pengelolaan sekolah berbasis komunitas yang lebih sistematis serta

mengkaji efektivitas penggunaan teknologi pendidikan alternatif untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan di wilayah serupa secara lebih luas dan mendalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bararah, I. (2020). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Jurnal Mudarrisa*, 10(2), 351–370. <https://doi.org/10.22373/jm.v10i2.7842>
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan reliabilitas penelitian: Dilengkapi analisis dengan NVIVO, SPSS dan AMOS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewi, T., & Noor, T. R. (2024). Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatus Syarifah Sidoarjo. *MANAZHIM*, 6(1), 23–36. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v6i1.3869>
- Falah, A. I., & Hadna, A. H. (2022). Problematika Pendidikan Masa Pandemi di Indonesia pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 164 - 185. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>
- Harris, A., & Muijs, D. (2005). *Improving schools through teacher leadership*. Open University Press.
- Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). Transformational leadership. In B. Davies (Ed.), *The essentials of school leadership* (pp. 31-43). SAGE Publications.
- Masjudin., & Husniati. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Tenaga Kependidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Ta'dib*, 16(I), 70–86.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nasir, & Mujiati. (2020). Pengelolaan tenaga pendidik (guru) di rural area. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 22–35. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v20i1.4383>
- Nurussalami, N. (2022). Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dalam peningkatkan mutu pendidikan. *Intelektualita*, 11(1), 88–99.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
- Raihani. (2007). Education reforms in Indonesia in the twenty-first century. *International Education Journal*, 8(1), 172–183.
- Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. *Educational Administration Quarterly*, 44(5), 635–674. <https://doi.org/10.1177/0013161X08321509>
- Shafira, D., Aditya, F. A., Anggia, I. R., Putri, N. N. K., Hanif, S. A., & Prihantini, P. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Pendidikan Modern. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(1), 868–879. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i1.2557>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamam, H., Hasan, & Mubah. (2020). Pengelolaan pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama Al-Faqih Sumber Nyamplong Kowel Pamekasan. *Eduprof: Jurnal Pendidikan Profesi*, 12(2), 145–155.
- Ucok, R. A., Mas, S. R., & Sukung, A. (2017). Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dasar pada daerah terpencil di Kabupaten Tojo Una-Una. *Normalita*, 9(1), 12–23. <https://ejournal.ibu.ac.id/index.php/Normalita>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Vangrieken, K., Meredith, C., Packer, T., & Kyndt, E. (2017). Teacher communities as a context for professional development: A systematic review. *Teaching and Teacher Education*, 61, 47–59. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.10.001>

- Warsono. (2020). Pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 15(2), 101–112.
- Yesa. (2022). Manajemen sarana dan prasarana di daerah terpencil. *EduTech Journal*, 4(1), 54–63.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.